

# **LAPORAN**

## **STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2007**



**Diterbitkan : Desember 2007**  
**Data : Oktober 2006 - Oktober 2007**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

# **TIM PENYUSUN BUKU STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DAN KUMPULAN DATA KABUPATEN BARITO SELATAN**

## **PEMBINA :**

Bupati Barito Selatan

## **PENGARAH :**

Kepala Bapedalda Kabupaten Barito Selatan

## **KETUA TIM PENYUSUN :**

Kabid Pelestarian dan Pemulihan Bapedalda Kabupaten Barito Selatan

## **ANGGOTA TIM PENYUSUN :**

YUSEP, WILSON, KAROLINA, RAMBANG KILING, LAMRIANA SINAGA.

## **SEKRETARIAT :**

MASDJAN, SUGIARTO, EDIE, BRIANTINO

## **NARASUMBER :**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Barito Selatan, BUMD dan Lembaga Non Pemerintah.

**BAPEDALDA KABUPATEN BARITO SELATAN**

**Alamat : Jl. Tugu, No. 2 Buntok 73712**

**Telp : (0525) 22693**

**Fax : (0525) 22693**

**E-mail : -**

**Web : -**

## **KATA PENGANTAR**

Dalam menopang pembangunan maka pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) harus dilaksanakan dengan mendasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan, dalam arti bahwa pembangunan tersebut dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial budaya serta dengan memperhatikan faktor Lingkungan. Tentunya tujuan tersebut akan dapat dicapai jika Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam hayati / non hayati dan Sumber Daya Buatan (SDB) dikelola dengan baik, proporsional dan transparan dengan didukung oleh kelembagaan yang kuat.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan tersedianya informasi yang diperlukan semua pihak yang berkenaan dengan penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan serta berbagai potensi dan peluang yang tersedia diwilayah Kabupaten Barito Selatan.

Kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan buku laporan Status Lingkungan Hidup Daerah ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi - tingginya, semoga bermanfaat bagi upaya mewujudkan masyarakat Barito Selatan yang DAHANI DAHANAI TUNTUNG TULUS MAJU MANDIRI BERKUALITAS MEMILIKI IPTEK DAN IMTAQ.

Buntok, Januari 2008

KEPALA BAPEDALDA KABUPATEN  
BARITO SELATAN,

**Ir. H. AGUSTEMAS SAMAD, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.530 005 963

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR PETA .....	iv
ABSTRAK .....	v
BAB. I PENDAHULUAN .....	1
1. Tujuan Penulisan Laporan .....	1
2. Visi dan Misi Kabupaten Barito Selatan .....	1
3. Gambaran Umum Wilayah .....	3
3.1. Kondisi Geografis .....	3
3.2. Luas Wilayah .....	3
3.3. Topografi .....	4
3.4. Iklim .....	5
3.5. Kependudukan .....	7
3.6. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup .....	8
3.7. Kebijakan Tata Ruang .....	11
3.8. Kebijakan Sosial, Ekonomi dan Budaya .....	12
BAB. II ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN .....	14
BAB. III AIR, UDARA, HUTAN DAN LAHAN SERTA KEANEKARAGAMAN HAYATI .....	17
1. Air .....	17
2. Udara .....	19
3. Hutan dan Lahan .....	20
4. Keanekaragaman Hayati .....	21
BAB. IV TINDAK LANJUT .....	23
DAFTAR PUSTAKA .....	24

## DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan sebelum pemekaran .....	4
Tabel. 2	Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan setelah pemekaran .....	4
Tabel. 3	Data Curah Hujan tahun 2006 .....	6
Tabel. 4	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin masing-masing Kecamatan .....	7
Tabel. 5	Tingkat Kepadatan Penduduk tiap Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 .....	7
Tabel. 6	Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan menurut Pemeluk Agama .....	8
Tabel. 7	Gambaran Umum sebagai Analisis Isu Lingkungan dan Evaluasi .....	15

## **DAFTAR PETA**

1. PETA KABUPATEN BARITO SELATAN

## **ABSTRAK**

Kabupaten Barito Selatan dengan luas wilayah 8.830 Km<sup>2</sup>, pada tahun 2006 memiliki jumlah penduduk 122.929 jiwa yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan terdiri dari 83 Desa / Kelurahan termasuk Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dan Pemukiman Masyarakat Suku Terasing (PMST).

Buntok sebagai Ibukota Kabupaten Barito Selatan selain berfungsi sebagai Pusat Perekonomian disisi lain juga berfungsi sebagai Pusat Pemerintahan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berupaya untuk senantiasa mendekatkan Pusat-pusat Pemerintahan mendekati masyarakat, hal ini dibuktikan salah satunya memekarkan beberapa desa dibeberapa Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Barito Selatan pada pertengahan semester pertama tahun 2006 yang lalu.

Secara kelembagaan Kabupaten Barito Selatan dilengkapi dengan 2 Sekretariat, 5 Badan, 13 Dinas, 7 Kantor, dan 1 RSUD, yang kesemuanya ini dimaksudkan untuk mempermudah dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat dengan jumlah pegawai 3.869 orang Pegawai Negeri Sipil.

Selain kelambagaan yang langsung berada dibawah Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan juga terdapat Instansi Vertikal yang menangani berbagai bidang seperti ; Kepolisian, Kodim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, BPS, BPN, KPKN, Penyuluh Pajak, Perbankan dan PBB.

Berdasarkan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2002 Kabupaten Barito Selatan dimekarkan menjadi Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur, sehingga posisi dan perbatasan mengalami perubahan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.



Sarana dan Prasarana baik fisik maupun non fisik yang ada di Kabupaten Barito Selatan masih cukup memadai dengan tingkat perkembangan penduduk. Seperti halnya sarana pendidikan, kesehatan, semuanya sudah menyentuh pranata kehidupan masyarakat pedesaan. Demikian juga halnya dengan sarana dan prasarana jalan baik Jalan Negara, Propinsi, maupun Kabupaten pada saat ini keadaannya masih bisa dilewati dengan baik walaupun sebagian kondisinya mengalami kerusakan. Sementara prasarana jalan yang sedang dibangun dari Kabupaten Barito Selatan ke Ibukota Propinsi (Buntok-Palangka Raya) berada dalam tahap pengerjaan, ditargetkan pada akhir tahun 2008 jalan sudah selesai dan akhir tahun 2009 jembatan juga sudah selesai dikerjakan.

Seperti diketahui bahwa dalam menopang pembangunan maka pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) harus mendasarkan pada konsep Pembangunan Berkelanjutan (PB), dalam arti bahwa pembangunan tersebut dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial budaya serta dengan memperhatikan faktor lingkungan; pembangunan yang bijaksana, tidak merusak atau menimbulkan masalah lingkungan, tetapi dapat menaikkan dan menjaga mutu lingkungan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Barito Selatan menuangkan kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup dalam Visi dan Misinya.

Kebijakan tata ruang Kabupaten Barito Selatan dalam proses Perda, yang menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan adalah RT RW Propinsi Nomor : 8 tahun 2003. Kebijakan sosial dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan penyelenggaraan sosialisasi ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, pelatihan dan pemberian insentif bagi kader lingkungan.

Kebijakan ekonomi dilakukan dengan menetapkan wajib AMDAL bagi Perusahaan-perusahaan yang Memiliki Ijin Pertambangan, HPH maupun Perkebunan yang dampaknya dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat disekitar perusahaan. Sedangkan kebijakan budaya dilakukan dengan tetap menjaga Adat Istiadat dan kearifan lokal / tradisional dalam pemerliharaan lingkungan hidup.

Untuk melanjutkan penanggulangan masalah lingkungan di Kabupaten Barito Selatan diperlukan kesadaran, kepedulian dan partisipasi dari Instansi Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah (Swasta) dan masyarakat dengan mengutamakan prinsip kemitraan dan kerjasama dibawah koordinasi Bapedalda Kabupaten Barito Selatan.

## **BAB. I.**

### **PENDAHULUAN**

#### 1. Tujuan Penulisan Laporan

Dengan mengacu kepada Pertemuan Umum Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLNH), bahwa Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah bertujuan :

- a. Menyediakan data, Informasi dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup Daerah.
- b. Meningkatkan mutu informasi tentang Lingkungan Hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.
- c. Menyediakan mutu informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan Kepentingan Penanaman Modal (Investor).
- d. Menyediakan informasi Lingkungan Hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penelitian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (Good Enviromental Governance) di daerah; serta sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan bersama-sama dengan Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

#### 2. Visi dan Misi Kabupaten Barito Selatan

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Kondisi saat ini, Peluang, Tatanan, kendala yang bersifat strategis dan Vital, landasan pemikiran menyangkut Aspek kewenangan dan hak Pengelolaan Daerah, maka ditetapkan rumusan **"VISI"** sebagai arah Pengembangan Pembangunan Kabupaten Barito Selatan yaitu : **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BARITO SELATAN DAHANI DAHANAI TUNTUNG TULUS, MAJU, MANDIRI BERKUALITAS DENGAN MEMILIKI IPTEK DAN IMTAQ"**

Yang mana menempatkan faktor stabilitas keamanan dan kesejahteraan menjadi pokok, baik masyarakat sebagai pelaku (target group) yang tercermin dalam pola sikap, perilaku, profesional, disiplin, etos kerja tinggi, menguasai IPTEK dengan bermuatan iman dan taqwa, mengelola Sumber Daya Alam secara optimal dengan segenap Aspek Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, Keamanan dengan memperhatikan Aspek Kelestarian.

Sementara itu dalam rangka untuk mewujudkan Visi yang merupakan keinginan, tekad dan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, maka ditetapkan pula "MISI" Pengembangan Pembangunan di Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengembangan Kehidupan bermasyarakat yang bermoral dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud nyata pengamalan Pancasila.
2. Menjadikan Kabupaten Barito Selatan sebagai daerah yang aman, damai dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat dengan menegakkan Supremasi Hukum, Pengembangan kehidupan politik dengan dasar toleransi, keadilan dan partisipasi yang berbasis multikultural.
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama usaha ekonomi produktif dan rumah tangga, pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem dan model ekonomi kerakyatan.
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang menguasai Iptek dan Imtaq untuk mewujudkan kehidupan Sosial Budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
5. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang bertanggungjawab dan ditujukan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

6. Mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan Pemerintah yang bersih, Profesional, Transparan, Kreatif dan Produktif.
7. Mewujudkan Kabupaten Barito Selatan menjadi Daerah Transit dan perdagangan serta kawasan wisata.

### 3. Gambaran Umum Wilayah

#### 3.1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Barito Selatan terletak didaerah Khatulistiwa, yaitu  $1^{\circ}20$  Lintang Utara -  $2^{\circ}35$  Lintang Selatan dan  $114^{\circ}$  -  $115^{\circ}$  Bujur Timur.

Berdasarkan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2002 Kabupaten Barito Selatan dimekarkan menjadi Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur, sehingga posisi dan perbatasan mengalami perubahan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.

#### 3.2. Luas Wilayah

Kabupaten Barito Selatan pada Tahun 2001 (sebelum pemekaran) mempunyai Luas wilayah  $12.664 \text{ Km}^2$  terdiri dari 12 Kecamatan, setelah pemekaran pada Tahun 2002 luas wilayah menjadi  $8.830 \text{ Km}^2$  terdiri dari 6 Kecamatan. Untuk lebih jelasnya luas wilayah Kabupaten Barito Selatan Per Kecamatan sebagai berikut :

Tabel.1. Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan sebelum Pemekaran

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	% Luas Kabupaten Barito Selatan
1.	Jenamas	708	5,60
2.	Dusun Hilir	2.065	16,31
3.	Karau Kuala	1.099	8,86
4.	Dusun Selatan	1.829	14,44
5.	Dusun Utara	1.196	9,44
6.	Gunung Bintang Awai	1.933	15,26
7.	Dusun Tengah	1.007	7,95
8.	Pematang Karau	579	4,57
9.	Awang	203	1,60
10.	Patangkep Tutui	255	2,01
11.	Dusun Timur	1.532	12,10
12.	Benua Lima	258	2,04
	Jumlah	12.664	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan.

Tabel. 2. Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan setelah Pemekaran

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	% Luas Kabupaten Barito Selatan
1.	Jenamas	708	8,02
2.	Dusun Hilir	2.065	23,39
3.	Karau Kuala	1.099	12,45
4.	Dusun Selatan	1.829	20,71
5.	Dusun Utara	1.196	13,54
6.	Gunung Bintang Awai	1.933	21,89
	Jumlah	8.830	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan.

### 3.3. Topografi

Kabupaten Barito Selatan dilihat dari segi Topografinya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bagian-bagian yang membujur dari Utara ke Selatan dan membentang dari Timur ke Barat dan bagian Barat itu sendiri, sebagai berikut :

- a. Bagian sebelah Utara ke Selatan daerah pantai menyusuri Sungai Barito dengan ketinggian 10 s/d 50 meter dari permukaan laut merupakan daerah yang mempunyai potensi banjir cukup tinggi.

- b. Bagian sebelah Timur merupakan dataran tinggi yang bergelombang dengan ketinggian 400 meter dari Permukaan laut dengan kemiringan 19 s/d 25 persen dialiri anak Sungai Barito.
- c. Sedangkan pada bagian Barat terdapat rawa-rawa yang dialiri oleh Sungai kecil yang mengalir ke Sungai Barito.

Adapun jenis tanah di Kabupaten Barito Selatan terdiri dari 4 (empat) macam jenis tanah, yaitu :

- a. Alluvial, jenis tanah ini terdapat di sepanjang aliran Sungai Barito dan tanah seperti ini biasanya subur karena banyak mengandung unsur hara.
- b. Litosol, jenis tanah ini dengan bahan batuan induk, batuan baku dan terdapat di daerah berombak dan bergelombang.
- c. Podsolik Merah Kuning, jenis tanah ini dengan batuan induk, batuan baku dan terdapat di wilayah berbukit.
- d. Litosol, jenis tanah ini dengan bahan batuan induk, pasir pantai, bentuk wilayah datar sampai cekung dengan reaksi pH tanahnya asam.

### 3.4. I k l i m

Kabupaten Barito Selatan secara umum termasuk daerah beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 32<sup>0</sup>C sampai dengan 36<sup>0</sup>C. Dari ketinggian 0 – 500 m dari permukaan laut, angin bertiup dari arah Barat dan Tenggara yang berganti setiap 6 (enam) bulan sekali sehingga mempengaruhi dua musim yaitu bulan kering dan bulan basah, dimana pada bulan November sampai dengan bulan Juni termasuk bulan basah dan bulan Juli sampai dengan bulan Oktober termasuk bulan kering.

Sedangkan curah hujan tertinggi Tahun 2006 terjadi pada bulan April dengan curah hujan 541 mm dan hari hujan sebanyak 17 hari hujan. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dengan curah hujan 14 mm dan hari hujan sebanyak 4 hari hujan.

Tabel. 3 Data Curah Hujan

Kota / Kabupaten : Barito Selatan  
 Provinsi : Kalimantan Tengah  
 Lokasi Stasiun Pemantau : Diperta Barsel  
 Tahun Data : 2006

Tanggal	Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
	(mm)												
1	-	-	52	7	-	8	-	-	-	-	-	-	29
2	5	6	3	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	57	0	9	73	64	-	-	-	-	-	-	30
4	38	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	49
5	12	51	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	39	-	16	14	12	16	-	-	-	-	-	13	-
7	21	7	-	-	52	-	-	-	-	-	-	84	-
8	51	2	-	-	-	7	-	-	-	8	-	-	5
9	-	-	6	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-
10	-	11	-	-	110	-	-	-	-	-	0	7	-
11	3	-	15	13	12	-	-	-	-	-	-	-	75
12	-	39	20	122	20	30	-	-	-	-	-	-	13
13	-	14	-	-	-	11	-	-	-	47	-	27	-
14	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	26	-	42	50	-	-	-	-	-	-	-	2	-
16	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	2	6	48	79	-	-	-	0	-	-	-	-	-
18	51	13	-	31	47	-	-	-	-	-	-	-	-
19	12	-	-	-	40	-	38	-	-	-	-	-	-
20	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
21	-	14	65	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	35	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	86	8	-	105	-	-	-	-	20	-	27
24	-	136	7	-	-	26	-	-	-	-	0	3	24
25	-	4	24	32	-	14	-	8	-	-	-	-	-
26	3	-	-	-	-	152	9	-	-	-	-	-	-
27	-	3	11	0	4	-	-	-	-	-	-	14	-
28	-	53	-	41	-	-	10	-	-	-	-	58	40
29	-	-	22	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
31	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Curah Hujan	283	434	455	541	403	433	58	14	116	20	208	421	
Jumlah Hari Hujan	14	16	17	17	10	10	4	3	3	3	8	11	

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan.

### 3.5. Kependudukan

#### a. Jumlah Penduduk

Kabupaten Barito Selatan dengan luas wilayah 8.830 Km<sup>2</sup>, pada tahun 2006 memiliki jumlah penduduk 122.929 jiwa yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan dengan penduduk masing-masing Kecamatan menurut jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel.4. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin masing-masing Kecamatan.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk ( Jiwa )		Jumlah	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Jenamas	5.573	5.536	11.109	98
2.	Dusun Hilir	8.481	8.129	16.610	104
3.	Karau Kuala	8.351	8.234	16.585	101
4.	Dusun Selatan	23.782	22.848	46.630	104
5.	Dusun Utara	8.464	8.268	16.732	105
6.	G.B. Awai	7.927	7.336	15.263	110
	Jumlah	62.578	60.351	122.929	104

Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan.

#### b. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Barito Selatan yang memiliki luas wilayah 8.830 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 122.929 jiwa, maka dari hasil registrasi penduduk tahun 2006 Kabupaten Barito Selatan mempunyai tingkat kepadatan penduduk 14 Jiwa/Km<sup>2</sup>, dengan penyebaran masing-masing Kecamatan sebagai berikut :

Tabel.5. Tingkat Kepadatan Penduduk tiap Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk ( Jiwa )	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Tingkat Kependudukan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1.	Jenamas	11.109	708	16
2.	Dusun Hilir	16.610	2.065	8
3.	Karau Kuala	16.585	1.099	15
4.	Dusun Selatan	46.630	1.829	25
5.	Dusun Utara	16.732	1.196	14
6.	G.B. Awai	15.263	1.933	8
	Jumlah	122.929	8.830	14

Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan.



Sedangkan Penduduk Kabupaten Barito Selatan menurut pemeluk Agama, masing-masing sebagai berikut :

- a. Pemeluk Agama Islam = 84.447 Jiwa
- b. Pemeluk Agama Kristen Protestan = 25.029 Jiwa
- c. Pemeluk Agama Khatolik = 6.905 Jiwa
- d. Pemeluk Agama Hindu Kaharingan = 6.552 Jiwa
- e. Pemeluk Agama Budha = 26 Jiwa

Tabel.6. Jumlah Penduduk tiap Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan menurut Pemeluk Agama.

No	Kecamatan	Islam	Kristen Protestan	Kristen Khatolik	Hindu	Budha	Jumlah
1.	Jenamas	11.039	70	-	-	-	11.039
2.	Dusun Hilir	14.544	1.713	52	301	-	14.544
3.	Karau Kuala	13.829	2.172	247	342	-	13.829
4.	Dusun Selatan	26.344	12.244	4.352	3.664	26	26.344
5.	Dusun Utara	11.347	4.776	24	585	-	11.347
6.	G.B. Awai	7.349	4.054	2.230	1.630	-	7.349
	JUMLAH	84.447	25.029	6.905	6.522	26	122.929

Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan.

### 3.6. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup

Dalam menopang Pembangunan maka pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) harus dengan mendasarkan pada konsep Pembangunan berkelanjutan, dalam arti bahwa Pembangunan tersebut dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial budaya, serta dengan memperhatikan faktor Lingkungan.

Tujuan tersebut akan dapat dicapai jika :

- Mengelola Sumber Daya Alam untuk dimanfaatkan secara efisien, adil dan berkelanjutan yang didukung dengan kelembagaan yang handal dan penegakan hukum yang tegas.

- Mencegah terjadinya kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lebih parah, sehingga laju kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup semakin menurun.
- Memulihkan kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang rusak.
- Mempertahankan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang masih dalam kondisi baik untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan serta meningkatkan mutu dan potensinya.
- Meningkatkan kualitas fungsi Lingkungan Hidup.

Kabupaten Barito Selatan dalam mewujudkan Pembangunan berkelanjutan mempunyai Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor : 23 Tahun 1997 pasal 5 ayat (1) s / d (3) Jo ayat (1 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Barito Selatan selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pembangunan dibidang Lingkungan Hidup menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI : "TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN".

MISI : 1. Mendorong terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH).  
2. Pengendalian Dampak Lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan Pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Bapedalda Kabupaten Barito Selatan membuat Kebijakan-kebijakan yang tertuang dan telah dilaksanakan pada tahun 2007 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatannya :
  - a. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
  - b. Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program Dalam Daerah.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatannya :
  - a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
  - b. Pemantauan Kualitas Lingkungan (Pengujian dan Survey Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Danau)
  - c. Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup)
  - d. Pemantauan Kualitas Lingkungan (Dana Pendamping DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup).
  - e. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup (Wasdal)
  - f. Pengkajian Dampak Lingkungan (Penelitian Dampak Pengasapan Rotan)
  - g. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Rapat Regional)
  - h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan (Sosialisasi Pengasapan Rotan)
  - i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Komisi Penilai dan Tim Teknis AMDAL Kabupaten Barito Selatan)
  - j. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Rapat Koordinasi dan Investigasi Masalah Pengelolaan Lingkungan Hidup)
  - k. Dana Penunjang DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatannya :
  - a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (Penyuluhan)
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan kegiatannya :
  - a. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang Lingkungan (Lomba Kebersihan)
  - b. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang Lingkungan (Lomba Melukis dan mewarna)
  - c. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang Lingkungan (Turnamen Bola Voli)
  - d. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang Lingkungan (Upacara Hari Lingkungan Hidup)
  - e. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (Buku Status Lingkungan Hidup Tahun 2007)
  - f. Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Hidup (Pameran Lingkungan Hidup Se – Indonesia)
5. Program Pengendalian Kebakaran Hutan, dengan kegiatannya :
  - a. Pemetaan Kawasan Kebakaran Hutan
  - b. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan
  - c. Sosialisasi Kebijakan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Kebakaran Hutan (Sosialisasi Perda)
  - d. Sosialisasi Kebijakan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Kebakaran Hutan (Pelatihan Pemadam Kebakaran Hutan)
  - e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

### 3.7. Kebijakan Tata Ruang

Kabupaten Barito Selatan dalam melakukan kegiatan Pembangunan berkelanjutan belum mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sampai sekarang masih dalam proses Perda, yang menjadi Acuan selama ini adalah RTRW Provinsi yang disahkan (RTRW Nomor : 8 Tahun 2003).

### 3.8. Kebijakan Sosial, Ekonomi dan Budaya

#### a. Kebijakan Sosial

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Sosial dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian terhadap Lingkungan Hidup dengan penyelenggaraan Komunikasi Lingkungan Hidup seperti Sosialisasi ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam, Pelatihan, pemberian Insentif bagi masyarakat yang menjadi Kader Lingkungan di Desa Kecamatan sebagai wujud nyata partisipasi dan kesiapan aparat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup akan meningkat dengan adanya motivasi dan kesadaran untuk memelihara Lingkungan masing-masing.

#### b. Kebijakan Ekonomi

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Ekonomi dilakukan dengan menetapkan wajib AMDAL bagi perusahaan yang memiliki Izin Pertambangan, HPH maupun Perkebunan. Dengan adanya dokumen AMDAL maka akan memberikan peningkatan Perekonomian bagi masyarakat karena perusahaan memberikan kesempatan kerja dan berusaha sehingga akan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat disekitar perusahaan. Pengangguran akan berkurang dan sarana perangsang perekonomian masyarakat seperti pasar, toko, kios/warung, rumah makan akan bertambah jumlahnya.

#### c. Kebijakan Budaya

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Budaya telah dimiliki oleh masyarakat Barito Selatan secara turun-temurun. Adat Istiadat dan orientasi budaya menjadi pedoman dalam menjaga kelestarian Lingkungan Hidup. Hanya saja sebagian orang masih kurang menjaga kearifan Tradisional dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Sebagai contoh : Pada musim kering yang berkepanjangan masih ada masyarakat yang membakar

ladangnya secara tidak terkontrol dan tidak dibatasi sekat bakar untuk pembukaan lahan baru, padahal api bisa menjalar dan merambat kemana-mana apabila tidak dapat dikendalikan; selain itu masih saja ada yang suka iseng membuang puntung rokok dipinggir jalan, sekitar semak belukar atau disembarang tempat sehingga berdampak kebakaran yang meluas disekitar hutan dan lahan disekitarnya.

Kebijakan yang dilakukan Bapedalda Kabupaten Barito Selatan untuk pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah dengan Pembuatan dan pemasangan rambu-rambu atau larangan pembakaran hutan, pemasangan spanduk larangan pembakaran hutan dan lahan pada tiap-tiap ruas jalan di Kabupaten, Kecamatan atau di Desa yang dianggap rawan kebakaran.

## **BAB. II.**

### **ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN**

Kegiatan manusia merupakan faktor utama menimbulkan isu-isu Lingkungan. Isu Lingkungan terjadi karena kegiatan itu tidak berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Kegiatan manusia sebagai suatu penyebab atau tekanan (pressure) pada lingkungan menimbulkan kondisi atau status (state) yang tidak transparan dapat mengakibatkan dampak (impact) menurunnya kualitas lingkungan sehingga diperlukan penanggulangan (response) untuk pemeliharaan dan pemulihan mutu lingkungan.

Hal ini merupakan suatu rangkaian proses yang tidak terpisahkan karena adanya keterkaitan sebab akibat antara satu dengan yang lainnya. Secara sederhana isu lingkungan yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan dapat dianalisis dan dievaluasi kebijakannya secara pendekatan P-S-R dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mencari penyebab atau tekanan (pressure) yang menyebabkan terjadinya kerusakan / penurunan kualitas lingkungan.
2. Menentukan kondisi atau status (state) Lingkungan Hidup sesuai dengan isu-isu yang terjadi dan bertentangan dengan pembangunan berkelanjutan.
3. Mengidentifikasi dampak (impact) sebagai akibat adanya kerusakan lingkungan.
4. Mengembangkan alternatif penanggulangan (response) yang telah dilakukan oleh Pemerintah (Stakholders) dan Swasta (pelaku kebijakan) maupun masyarakat (penerima dampak kebijakan).

Analisis isu lingkungan dan evaluasi kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 7. Gambaran Umum sebagai Analisis Isu Lingkungan dan Evaluasi Kebijakan dengan Pendekatan P-S-R.

No	Penyebab atau tekanan (pressure)	Kondisi atau Status (State)	Dampak (Impact)	Penanggulangan (Response)
1	2	3	4	5
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penebangan liar / Perambahan Hutan tidak terkendali.</li> <li>b. Pengusahaan hutan / produksi diluar / melebihi kapasitas ijin usaha.</li> <li>c. Pemilikan / penjualan kayu tanpa ijin / dokumen yang sah.</li> </ul>	Illegal Logging	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerusakan hutan dan lahan.</li> <li>- Berkurangnya flora dan fauna.</li> <li>- Satwa liar terganggu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Per Undang-undangan Lingkungan Hidup</li> <li>- Pembatasan jumlah produksi wajib AMDAL bagi HPH.</li> <li>- Wajib memiliki SKSHH.</li> <li>- Penegakan Hukum.</li> </ul>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Curah hujan tinggi</li> <li>b. Penebangan tanpa Konservasi (penghijauan kembali).</li> <li>c. Pengelolaan sampah / limbah tidak tepat (membuang sampah sembarangan).</li> </ul>	Banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerusakan pemukiman dan lahan pertanian (dalam arti luas).</li> <li>- Berkurangnya pohon - pohon menyerap air dan menjaga kualitas air.</li> <li>- Tertutupnya aliran sungai kecil menuju sungai induk.</li> <li>- Pendangkalan Das Barito.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Per Undang-undangan Lingkungan Hidup</li> <li>- Wajib AMDAL bagi setiap perusahaan yang mendapat izin HPH, Pertambangan Perkebunan.</li> <li>- Penghijauan kembali hutan-hutan gundul</li> <li>- Pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.</li> <li>- Pengelolaan Sampah.</li> <li>- Menumbuhkan kesadaran/partisipasi masyarakat akan lingkungan misalnya : lomba kebersihan lingkungan.</li> </ul>



1	2	3	4	5
3.	<p>a. Kemarau yang berkepanjangan.</p> <p>b. Pembakaran hutan yang tidak terkontrol untuk pembukaan lahan.</p> <p>c. Membuang puntung rokok dipinggir jalan secara sembarangan.</p> <p>d. Menyalakan api dan meninggalkannya tanpa memadamkan lebih dulu.</p>	Kebakaran Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadinya asap yang mengganggu aktifitas manusia (penurunan kualitas udara).</li> <li>- Berkurangnya flora dan fauna untuk menjaga kualitas udara dan air.</li> <li>- Berkurangnya habitat alami.</li> <li>- Satwa liar terganggu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Per Undang-undangan dan PP yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup</li> <li>- Pembuatan plang peringatan bahaya kebakaran hutan dan lahan di daerah rawan kebakaran</li> <li>- Pelatihan atau kursus dan membentuk posko pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan</li> <li>- Penegakan Hukum.</li> </ul>
4.	<p>a. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang berbahaya dan beracun.</p>	Illegal Fishing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencemaran air (penurunan kualitas air).</li> <li>- Punahnya habitat ikan.</li> <li>- Berkurangnya Biota air.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Per UU dan PP mengenai Lingkungan Hidup</li> <li>- Penegakan Hukum bagi pelanggar.</li> <li>- Pelatihan / kursus bagi masyarakat nelayan tentang pengelolaan sumber daya air.</li> </ul>
5.	<p>a. Pembebasan lahan</p> <p>b. Penambangan secara terbuka</p> <p>c. Pengoperasian sarana dan prasarana tambang.</p>	Aktivitas Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan kepemilikan</li> <li>- Berkurangnya habitat flora dan fauna.</li> <li>- Berkurangnya produksi pertanian.</li> <li>- Peningkatan erosi / Sedimentasi.</li> <li>- Penurunan kualitas tanah, air, udara.</li> <li>- Kurangnya tanah subur untuk rehabilitasi.</li> <li>- Berkurangnya luas lahan pertanian.</li> <li>- Penduduk terganggu dengan Kebisingan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Per UU dan PP mengenai Lingkungan Hidup dan Pertambangan.</li> <li>- Wajib AMDAL bagi perusahaan Pertambangan.</li> </ul>

## **BAB. III.**

### **AIR, UDARA, HUTAN DAN LAHAN SERTA KEANEKARAGAMAN HAYATI**

#### 1. Air

Kabupaten Barito Selatan adalah daerah bayangan hujan dan kawasan limpasan air yang berasal dari pegunungan / perbukitan di hulu Sungai Barito. Secara resmi siklus air sesuai dengan faktor Klimatologi pada dasarnya berada didalam posisi keseimbangan antara curah hujan, air aliran-lairan permukaan atau "*surface run off*" perkolasi atau peresapan kedalam tanah "*base flow*" air tanah yang kembali mengalir ke permukaan berupa mata air serta kembali diuapkan menjadi transpirasi lewat tumbuhan dan evaporasi lewat air yang ada.

Daerah aliran Sungai Barito merupakan kawasan di Kabupaten Barito Selatan yang sering mengalami banjir. Terjadinya bencana banjir disebabkan oleh ketidakseimbangan daur tata air. Hal ini sebagai akibat dari berkurangnya lahan hijau di bagian hulu DAS.

Dampak-dampak yang dikategorikan sebagai fenomena Geologi akan menjadi penghambat pembangunan, khususnya pada kawasan yang berindikasi dapat terjadi bencana, sehingga perlu dilakukan prioritas upaya penanganan dan mitigasi bencana.

Dalam rangka upaya penanganan dan pelaksanaan mitigasi bencana alam khususnya banjir, maka diperlukan perangkat :

- a. Aspek hukum yang meliputi seluruh landasan peraturan Per Undang-Undangan terutama PERDA yang mengatur mengenai bencana dan penanganan pasca bencana alam seperti standart operasi prosedur, kebijakan / keputusan penanganan secara cepat, serta peraturan-peraturan.

- b. Aspek kelembagaan merupakan organisasi / instansi yang bertanggungjawab untuk menangani masalah bencana alam BAKORNAS (Untuk tingkat Pemerintah Pusat) dan BAKORDA (untuk tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota).
- c. Aspek pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Dana, yang tidak terbatas kepada personal dari lembaga / Institusi resmi, tetapi semua orang terlibat disekitar lokasi rawan bencana membutuhkan profesionalisme dan pelatihan khusus, dengan dukungan sumber dana untuk upaya penanganan dan mitigasi bencana yang berasal dari Daerah dan Pemerintah Pusat maupun Internasional.
- d. Aspek pengendalian mencakup kinerja dari lembaga yang menangani bencana harus dapat di kontrol oleh publikasi secara langsung, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan tugas mulianya.
- e. Aspek pemantauan bertujuan untuk memberikan tindakan dan mengendalikan penanganan mitigasi bencana dapat mencapai keadaan yang diinginkan, serta melaksanakan tindakan dan prioritas termasuk pengumpulan data dan kontrol dana.
- f. Aspek tindakan dan penyediaan prasarana untuk mencapai keadaan yang diinginkan selama terjadi bencana dan penanganan pasca bencana, sehingga diperlukan sarana dan prasarana yang siap di operasionalkan setiap kali terjadi bencana.
- g. Aspek keterlibatan dan partisipasi masyarakat, dimana semua upaya mitigasi bencana alam dapat dilaksanakan secara efektif jika masyarakat terlibat dalam setiap kejadian bencana, sehingga penumbuhan kesadaran masyarakat perlu di pupuk oleh Pemerintah dan saling menolong menghadapi kesulitan.

## 2. Udara

Kebakaran hutan dan lahan terus saja terjadi hampir setiap tahun menghancurkan ribuan bahkan jutaan hektar luas lahan dan atau hutan kehilangan potensi dan keragaman hutan sudah tidak ternilai menyebabkan kerusakan, menimbulkan pencemaran udara dan dampaknya yang sering dipermasalahkan baik oleh Negara tetangga seperti : Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam karena asap yang ditimbulkan melintas batas Negara, maupun oleh negara-negara maju didunia dengan kekhawatiran akan dampak Global.

Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan selain karena musim kemarau yang biasa dimanfaatkan untuk pengolahan lahan dengan cara bakar, juga bisa terjadi karena unsur kesengajaan maupun karena sebab alamiah. Pengolahan lahan dengan cara bakar untuk kegiatan Skala kecil biasanya dilakukan oleh petani atau masyarakat peladang berpindah. Sedangkan pengolahan lahan dengan cara bakar dengan skala besar dilakukan oleh pengusaha untuk kegiatan perkebunan.

Pengolahan lahan dengan cara bakar sudah menjadi kebiasaan atau pola yang ditempuh oleh masyarakat atau pengusaha. Oleh karena, pola bakar merupakan cara yang paling sederhana, mudah dan murah untuk pembukaan pengolahan lahan, meskipun dapat berakibat fatal bagi pelestarian Lingkungan Hidup dan aktifitas masyarakat.

Dampak kebakaran terhadap kerugian Ekologi dan ekonomi sulit dihitung jumlahnya. Dampak lainnya akibat asap bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), radang paru-paru dan sebagainya. Kabut asap juga bisa menyebabkan terganggunya kegiatan transportasi baik transportasi darat, laut atau sungai dan udara.

Pencegahan dan penanggulangan pemadaman terjadinya kebakaran memang sulit dilakukan. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sarana prasarana, kemampuan Sumber Daya Manusia, dana dan lokasi yang sulit dijangkau. Untuk meminimalisasi kendala tersebut diperlukan keterlibatan masyarakat secara luas.

Namun pada tahun 2006 - 2007 kejadian kebakaran hutan sudah mulai berkurang walaupun ada, itupun dalam skala kecil yaitu akibat adanya pembakaran lahan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan oleh petani / masyarakat yang belum begitu sadar atas adanya Peraturan – peraturan dari Pemerintah.

Disamping itu kemarau di Kabupaten Barito Selatan relatif pendek karena hujan turun lebih awal sehingga kebakaran hutan pun relatif kecil. Berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya dimana musim kemarau atau kekeringan lebih lama dan lahan hutan serta semak belukar pun lebih awal mengering. Walaupun demikian pemantauan dari satelit NOAA pada tanggal 2 Oktober 2007 terdapat 32 (Tiga Puluh Dua) Titik Api / Hot Spot yang tersebar di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

### 3. Hutan dan Lahan

Semakin maningkatnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya perekonomian menyebabkan peningkatan kebutuhan akan lahan untuk pemukiman, Pusat-pusat Bisnis, Industri maupun kegiatan ekonomi lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan akan lahan tersebut dilakukan dengan cara merubah fungsi lahan dan hutan, perubahan lahan terjadi mulai dari hutan menjadi lahan perkebunan, lahan pertambangan, dari hutan juga menjadi ladang, lokasi industri hulu / hilir, perkampungan / pemukiman baru dan pembangunan sarana dan prasarana.

Perubahan hutan ini menyebabkan berkurangnya luas kawasan hutan, konservasi dan daerah resapan air. Perubahan lahan dan fungsi juga menyebabkan tidak terkendalinya pengaturan cuaca / Iklim dan tata air oleh alam. Alam dapat mengatur dirinya dan lebih baik kalau kita ikut mengatur, mengembalikan fungsinya agar terhindar dari segala kemungkinan gejala alam yang tidak diketahui.

Illegal Logging di Indonesia menjadi persoalan serius didunia, karena berdasarkan penelitian Bank Dunia (World Bank) telah terjadi Degradasi Sumber Daya Hutan (SDH) sudah cukup parah akibat kejahatan dibidang kehutanan oleh perorangan kelompok masyarakat, perusahaan tidak berizin dan orang-orang atau oknum yang tidak bertanggungjawab.

Demikian juga halnya di Kabupaten Barito Selatan Illegal Logging juga cukup marak, Kegiatan perambah hutan dan penebangan liar menunjukkan peningkatan baik dalam jumlah maupun penyebarannya. Penebang liar (Illegal Logging) tidak saja merusak kelestarian hutan, kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup melainkan juga mengancam kehidupan manusia. Untuk itu diperlukan komitmen dari lembaga yang terkait untuk melakukan operasi secara terus menerus pemberantasan praktek Illegal Logging tersebut, sebab kelihatannya praktek ini termasuk kejahatan lingkungan yang terorganisir.

#### 4. Keanekaragaman Hayati

Di Kabupaten Barito Selatan pada awal bulan Desember 2007 tepatnya pada tanggal 8 -11 Desember 2007 telah dilaksanakan Pameran tanaman Anggrek dan tanaman hias lainnya dalam rangka memperingati Hari Habitat, Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Kegiatan tersebut yang diimplementasikan dalam bentuk pameran merupakan upaya untuk membentuk kepedulian dan membangun kesadaran sedini mungkin terhadap pentingnya Pelestarian Lingkungan sehingga diharapkan mampu menciptakan pola perilaku baru yang bersahabat dengan Lingkungan.

Adapun tujuan daripada pameran tersebut adalah menumbuhkan kecintaan masyarakat Barito Selatan terhadap tanaman Anggrek dan tanaman hias lainnya sehingga mendorong minat untuk menangkan atau membudidayakannya yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman dan pada akhirnya diharapkan menjadi komoditas yang bernilai ekonomis sekaligus kelestariannya dapat terjaga.

## **BAB. IV.**

### **TINDAK LANJUT**

Sebagaimana dalam pembahasan pada analisis, maka rencana tindak lanjut yang untuk Pengelolaan Lingkungan di Barito Selatan yaitu :

1. Peningkatan pengawasan terhadap lokasi Illegal Logging atau pembalakan liar dilakukan dengan cara menurunkan Tim Pengawas atau Tim Investigasi ke Lapangan. Disamping itu perlu dikembangkan sistem pengawasan oleh masyarakat, yang dilakukan dengan cara Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan. Dimana tujuan dari sosialisasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap aspek hukum pengelolaan sumber daya hutan disekitarnya, peningkatan sikap masyarakat sehingga mempunyai rasa untuk melindungi kawasan hutan disekitarnya, serta peningkatan keterampilan dan legalitas untuk memanfaatkan hutan selain hasil kayunya yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatannya.
2. Kerjasama antar kelembagaan lintas pelaku baik secara bilateral maupun multilateral untuk mengantisipasi dari kebakaran hutan dan lahan.
3. Antisipasi penanggulangan bencana banjir yang akan datang dengan cara memperbaiki sistem lingkungan yaitu penebangan kayu dibatasi, penanaman pohon, pengerukan sungai DAS Barito untuk mengurangi sedimentasi.
4. Kuasa Pertambangan yang sudah memiliki ijin pertambangan perlu melengkapi dengan dokumen AMDAL supaya pengawasan dan pengendalian lingkungan dapat diantisipasi dan di evaluasi sebelum terjadinya penurunan kualitas lingkungan.
5. Peningkatan pengawasan serta penyuluhan peraturan tentang larangan menggunakan alat atau bahan yang dapat membahayakan kelestarian biota air.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bapedalda Kabupaten Barito Selatan, 2005. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- \_\_\_\_\_ Rencana Strategis Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (RENSTRA).
- Bruce Mitchell, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, 2000. Pengelolaan Sumber daya dan Lingkungan, Gadjah Mada University Press cetakan pertama Agustus, Yogyakarta.
- Erri N. Magantara dan Oekan S. Abdoellah, 2001. Sumberdaya Alam dan Pembangunan Berkelanjutan (Bahan Makalah Pendidikan Seskoau angkatan 38).
- Hikmat Ramdan, Yusran, Dulung Darusman, 2003. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Otonomi Daerah Perspektif Kebijakan dan Valuasi Ekonomi. Alqaprint Jatinangor cetakan pertama Januari 2003, Bandung.
- Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2005. Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004, Kementrian Lingkungan Hidup.
- Otto Soemarwoto, 1997. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Djambatan, cetakan ketujuh (Edisi revisi), Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, 2007. Selayang Pandang Kabupaten Barito Selatan.
- Peraturan daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2002, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Barito Selatan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan.